

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial <i>The tragic story of Girls in Commercial Sexual Industry</i> Bagong Suyanto	163–173
Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS <i>Gender Inequality Against Local Women in HIV/AIDS Prevention</i> Maimunah	174–183
Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir <i>Mitigation Strategic Model Based of Women Needs in Survivor Community at flood areas</i> Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih	184–194
Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal <i>The Establishment of Empowerment Model of Fish Monger Women in Underdeveloped Village</i> Waluyo Handoko, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari	195–201
Sistem Penguasaan Lahan dan Politik Pertanahan di Ekosistem Mangrove <i>The System of Land Tanure and Land Politics in Mangrove Ecosystem</i> Lukas Rumboko Wibowo dan C. Woro M. Runggadini	202–213
Urgensi Kepemimpinan, Modal Sosial dan Kerja Kolektif dalam Pemberdayaan Desa Mandiri Energi <i>Leadership Urgency, Social Capital and Collective Work of Empowerment of Independent Energy Village</i> Hartoyo, R Sigit Krisbintoro, Fauzan Mardapa, Dwi Haryono	214–222
Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada <i>Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada</i> M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyas	223–232

Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada¹

Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada

M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyas²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah

ABSTRACT

This research aims to unearth and identify the various forms of identity politics of ethnic and political conflicts that occurred in Poso during the execution of pemilukada in 2010. The data collection methods were literature review, interview and focus group discussion (FGD). The data were analyzed using data editing, categorizing data, interpretations of the meaning of the data, and the formulation of a summary of the research, using the approach of ethics-emic. The results showed that in 2010 there was a tendency of new political contestation in Poso. Although the competition was pretty fierce among four candidates, but the issues of religion and ethnicity did not seem to work well. The new issues that arised showed how the society had fed up with these kind of issues. Therefore the jargon of safety and order was more readily accepted. Most candidates accommodated power sharing so that the combination of Islam-Christian became a good choice. The winning of candidates who had the most similar religion, ethnicity and family background had become the proof. The readiness of the committee in technical and integrity could minimize conflicts during the process. The coordination between all aspects of the committee had been a great share to have a safe regional general election.

Key words: ethnicity, political conflict, regional general election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai bentuk politik identitas etnik dan konflik politik yang terjadi di Kabupaten Poso selama kurun waktu pelaksanaan pemilukada, Tahun 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan kajian kepustakaan, wawancara dan focus group discussion (FGD). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (editing data, kategorisasi data, Interpretasi makna data, dan perumusan simpulan hasil penelitian), dengan menggunakan pendekatan etik-emic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pemilukada tahun 2010 memperlihatkan kecenderungan baru dalam kontestasi politik di Poso. Meski persaingan cukup sengit antara empat pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, namun isu-isu agama dan etnis tampaknya tidak laku dijual sebagai komoditas kampanye. Muncul isu-isu baru yang memperlihatkan adanya kejenuhan masyarakat Poso dengan konflik kekerasan yang berkepanjangan dan sekaligus pertimbangan logis mereka terhadap isu-isu yang menonjolkan etnisitas, sehingga jargon keamanan dan ketertiban, kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi lebih diterima sebagai sebuah solusi. Hal ini tidak lepas pula dari komposisi semua pasangan calon yang kelihatannya mengakomodasi konsep power sharing sehingga kombinasi Kristen-Islam menjadi pilihan, hal yang sekaligus menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten Poso saat ini. Fakta-fakta temuan penelitian memperlihatkan bahwa semua pasangan calon memainkan isu etnis dan agama, meski dalam skala lokalitas/berdasarkan wilayah menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat wilayah tersebut. Kemenangan pasangan calon tertentu di basis wilayah yang memiliki kesamaan identitas etnik, agama, latar belakang keluarga menjadi buktinya. Juga tampak pula pada beragam simbol-simbol etnis dan agama yang dimanfaatkan oleh pasangan calon sejak masa pencalonan hingga saat pencoblosan dilaksanakan. Kesiapan penyelenggara yang baik pada aspek teknis maupun aspek moralitas dan integritas terutama pada KPU Kabupaten Poso mampu meminimalisir konflik selama proses pilkada. Koordinasi antara pihak KPU, Panwaslukada, Pemerintah Daerah dan aparat keamanan juga memberi andil besar pada pelaksanaan pemilukada yang relatif aman di Kabupaten Poso.

Kata kunci: etnisitas, konflik politik, pemilukada

¹ Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dengan Nomor Kontrak: 189/SP2H/PL/DIT.Litabmas/IV/2011, Tanggal 14 April 2011

² Korespondensi: M. Nawawi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Jalan Sukarno Hatta Km. 9 Palu Sulawesi Tengah 94111. Telepon: (0451)422611, e-mail: muhnawawi@yahoo.com

Pemilukada adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan demokratis. Pemilukada yang karena konsekuensi dari otonomi daerah dan sistem demokrasi mengharuskan pelaksanaannya dengan cara langsung, yaitu pemilihan kepala daerah dengan melibatkan seluruh rakyat yang memiliki hak pilih serta tidak lagi melalui sistem pemilihan pada DPRD yang dianggap rawan intervensi politik dari level di atasnya dan kurang demokratis. Karenanya pemilukada kini menjadi arena pertarungan politisi yang ingin berkuasa di wilayah propinsi, kabupaten dan kota, alih-alih menganggapnya sebagai proses yang lebih baik, pemilukada kini banyak menuai masalah. Terjadinya politik uang baik saat penetapan melalui partai, saat kampanye dan menjelang pemungutan suara, terjadinya ketegangan dan konflik antar pendukung serta mahal biaya yang harus ditanggung pemerintah dalam penyelenggaraannya adalah sebagian kecil masalah yang patut diketengahkan.

Dalam masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat kita lihat pada kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa pemilukada propinsi, kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, putra daerah atau pendatang. Simbol-simbol tersebut kerap dijadikan isu politik dalam sosialisasi dan komunikasi politik para calon yang bersaing, baik dalam jabatan politik seperti eksekutif (gubernur, bupati, walikota) dan legislative (DPR Kabupaten, Kota dan Propinsi).

Aspek etnis tidak boleh dilupakan perannya dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini tampak pada proses pemilihan legislative dan Pemilukada. Mobilisasi pemilih dapat dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan etnisitas, baik etnis, agama dan sebutan penduduk asli atau pendatang. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak memengaruhi pilihan pemilih. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan etnis di mana ada dua atau lebih suku dominan di wilayah tersebut. Meski gambaran posisi etnis agak berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Studi yang dilaksanakan LSI tahun 2008 di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung menunjukkan hal tersebut. Dalam Pemilukada Kalimantan Barat, faktor etnis tampak memainkan peranan penting.

Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama. Peran ini berkurang dalam pelaksanaan Pemilukada di Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung. Di dua provinsi ini, sentimen etnis pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima kehadiran kepala daerah yang berbeda dengan etnis di luar dirinya.

Beragamnya etnis yang mendiami Kabupaten Poso telah menyebabkan suburnya politik identitas etnis. Mobilisasi dukungan digunakan dengan memanfaatkan komunikasi politik dengan pesan utama, putra daerah dan etnisitas lainnya. Ditambah lagi dengan disparitas agama yang dianut. Wacana tersebut juga menguat dalam penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati, yang sebisa mungkin berpasangan Kristen-Islam (bupati dari Kristen dan Wakilnya dari Islam). Upaya *power sharing* tersebut tentu saja untuk meningkatkan elektabilitas dan eliminasi potensi konflik. Hal ini sejalan dengan Klinken (2007:129), Baik bupati yang sedang menjabat maupun para calon penggantinya saat ini bukan orang-orang agamis. Namun begitu tim-tim sukses mereka berlomba melobi dukungan, agama menjadi hal yang sangat menentukan. Bagaimana dan mengapa nilai-nilai religious yang transenden begitu merasuk dalam politik lokal manakala berbagai aturan formal tetap bersifat sekuler dan tidak satu pun pemain kunci sangat agamis? Jawabannya berkaitan dengan kebutuhan calon menggalang dukungan politis. Poso memiliki banyak organisasi keagamaan namun sangat lemah dalam infrastruktur politik. Salah satu yang perlu dilihat dalam hal ini adalah aspek demografi kabupaten Poso. Persentase etnik Kabupaten Poso, meski tidak sempurna karena mencantumkan etnis lainnya sebagai persentase paling besar yaitu 72,87% (yang diduga terdiri dari Pamona, Napu, Bada, Mori, Tojo, Timor dan lainnya. 'Pen') selebihnya etnis Gorontalo 8,44%, Bugis 6,33%, Jawa 3,89%, Bali 3,43%, kaili 2,86%, Saluan 2,08%, Banggai 0,07% dan Buol 0,03%. Sementara persentase penganut agama sebelum pemekaran adalah Islam sebesar 55,99%, Kristen 40,16%, Hindu 3,12%, Budha 0,04% dan agama lainnya 0,68% (Suryadinata 2003:177), sementara setelah pemekaran Kabupaten Tojo Una-una terpisah dari Kabupaten Poso pada tahun 2003 persentase agama diperkirakan menjadi 57% Kristen, 35% Islam dan 7% Hindu dan 1% agama lainnya.

Sejarah Poso menunjukkan bahwa, dalam setiap pelaksanaan pemilukada baik sebelum reformasi maupun pasca reformasi selalu disertai dengan konflik politik yang nuansanya mengangkat etnisitas sebagai batas pembeda. Meski pada masa Orde Baru

etnisitas dalam kepemimpinan Poso dapat direduksi oleh kekuatan pusat, namun ketegangan antar tokoh atau calon bupati dan pendukungnya tidak bisa hilang. Terlebih setelah reformasi berlangsung, politik identitas etnik seolah menemukan lahan subur untuk menyemai. Berubah-ubahnya komposisi etnik dan agama pada aspek demografi penduduk Poso akibat konflik dan pemekaran wilayah menyebabkan dinamika politik di daerah ini juga sangat dinamis (Klinken 2007).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana gambaran utuh aspek etnisitas di Kabupaten Poso, terutama dalam kegiatan mobilisasi dukungan politik para kandidat calon bupati?; 2) identifikasi simbol-simbol dan atribut etnik yang digunakan dalam politik perbedaan dan upaya mobilisasi dukungan politik dalam Pilkada yang dapat memengaruhi harmoni sosial masyarakat?; 3) identifikasi konflik-konflik politik yang terjadi selama pelaksanaan pemilukada terutama disebabkan oleh upaya politisasi identitas etnik?

Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan: 1) kehidupan masyarakat kabupaten Poso yang tumbuh dari multicultural yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga kegiatan politik seperti pemilukada akan sangat dipengaruhi oleh warna etnis masing-masing; 2) pada tahun 1998 sampai 2007 kabupaten Poso mengalami konflik yang diantaranya disebabkan oleh kontestasi politik antara elit yang menggunakan simbol dan atribut etnik serta agama; dan 3) sehingga menimbulkan adanya stereotype dan prasangka negatif dipihak lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui; wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumentasi berupa arsip penyelenggara pemilukada, berita dan artikel di surat kabar, foto-foto dan barang cetakan yang digunakan sebagai alat peraga yang menunjukkan adanya simbol-simbol dan atribut identitas etnik.

Informan ditentukan secara *purposive*, sebagai berikut: (1) KPU; (2) Panwas Pemilukada; (3) Tim Sukses; (4) Tokoh Adat Poso; (5) Tokoh agama dan tokoh masyarakat; (6) Organisasi Pemuda dan LSM; dan (7) Akademisi.

Proses analisis data hasil penelitian tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1) editing data, yakni mengecek kebenaran hasil

observasi, hasil wawancara dan mentransfer hasil rekaman wawancara dalam bentuk tulisan; 2) kategorisasi data; yakni melakukan pengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian; 3) interpretasi makna data; yakni menafsirkan makna (*meaning*) yang terkandung dalam data dari jawaban para informan; dan 4) merumuskan beberapa kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Banyak ahli politik mengatakan bahwa faktor etnisitas tidak lagi cukup berpengaruh dalam kontestasi politik pada level nasional. Mallarangeng (1997), William Liddle & Saiful Mudjani (2007) menyatakan bahwa faktor etnis dan agama tidak lagi merupakan isu utama yang berpengaruh dalam kontestasi politik nasional. Tetapi dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ananta *et.al* (2004) sebaliknya, bahwa faktor etnisitas masih merupakan jualan yang laku dalam politik Indonesia. Alasan utama yang diajukan adalah karena para pemilih di Indonesia sangat sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional.

Perilaku politik dan politik identitas etnik pada level nasional berbeda dengan konteks lokal. Ananta (2004) di atas hasil studi Aragon (2007) menyebutkan bahwa Bupati Poso mulai menerapkan politik identitas agama pada tahun 1998 karena termotivasi oleh kombinasi antara ideologi dan melindungi kekuasaan serta imbalan politis. Transisi ke otonomi dinilai terkait dengan kekerasan kolektif yang terjadi di Poso karena para pemimpin kabupaten berusaha memicu ketegangan agama untuk memobilisasi calon pemilih. Ketika proses mediasi konflik Poso berlangsung tahun 2001, di mana orang-orang Muslim dan Protestan lari dari wilayah mereka, para pemimpin Muslim melobi blok-blok etnis yang terpecah belah untuk menciptakan kabupaten-kabupaten baru bagi administrasi dan pembangunan. Politikus dari Muslim Bungku mengajukan gagasan Kabupaten Morowali untuk menyatukan etnis Bungku dan Mori, sebelum mengambil kendali Kabupaten Poso dari seorang pemimpin beretnis Tojo. Sebaliknya etnis Tojo mulai mengetengahkan usulan pembentukan Kabupaten Tojo Una-una sebagai sarana untuk meraih kembali sebuah pusat kekuasaan regional di wilayah etnis mereka sendiri.

Etnisitas menjadi aspek yang penting dalam hubungan politik. Pada dasarnya term ini muncul karena menyangkut gagasan tentang perbedaan, dikotomi antara kami dan mereka dan perbedaan

atas klaim terhadap dasar, asal usul dan karakteristik budaya. Etnisitas adalah hasil dari proses hubungan, bukan karena proses isolasi. Jika tidak ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar, tidak ada namanya etnisitas (Dwiyer 1996 dalam Abdillah 2002:15). Erikson (1993), menambahkan syarat kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut sedikitnya telah menjalin hubungan, kontak dengan kelompok etnis yang lain dan masing-masing menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara cultural maupun politik.

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Konsepsi tentang politik identitas mulai mengemuka pada symposium internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994, yang menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktik politik identitas dan menjadikannya kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Heller (dalam Abdillah 2002:16) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik utama. Setelah kegagalan narasi besar, ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain, meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas, rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang dalam gagasan besar lama.

Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentikkan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik etnis mengacu kepada politik “kelompok etnis” dan minoritas kecil sementara penafsiran kelompok etnis bisa mencakup bangsa etnis (*ethnic nation*). Pada wacana politik kontemporer nuansanya lebih sempit. Dalam konteks ini, biasanya kelompok etnis tidak memiliki teritori tertentu. Tujuan mereka pun berbeda dengan nasionalis klasik, mereka menghendaki “determinasi diri kebangsaan” dalam suatu wilayah bangsa. Akan tetapi, lebih pada penerimaan proteksi dan kemajuan bagi kelompok, khususnya bagi individu-individu dalam kelompok itu, dalam suatu negara yang sudah ada (Kellas 1988 dalam Abdillah 2002:18).

Identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim dilakukan pada masyarakat yang multietnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik pada daerah multietnik terutama pada saat pemilukada,

identifikasi identitas etnik menjadi kemestian dalam perilaku dan komunikasi politik baik dalam aktivitas dan peran politik maupun dalam kehidupan sosial secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, meningkatkan popularitas dan tujuan politik lainnya. Keadaan ini sesuai dengan Fredrik Barth (dalam Mulyana 2002) yang menyebutnya sebagai *situational ethnicity*.

Etnisitas yang terbangun dalam relasi kekuasaan antar kelompok, merupakan sinyal keterpinggiran, sinyal tentang pusat dan pinggiran, dalam konteks sejarah yang selalu berubah. Di sini, pusat dan pinggiran dibentuk dalam representasi politik. Seperti argument Barth (1988:76), adalah penting untuk menjadikan sebuah aksioma bahwa apa yang dipresentasikan sebagai pinggiran tidaklah sepenuhnya pinggiran tetapi merupakan efek dari representasi itu sendiri. Simbolon (dalam INCIS 2002:69) menyatakan bahwa etnisitas merupakan hasil konstruksi proses sosial yang lazim disebut askripsi (*ascription*). Proses sosial menandai sekelompok masyarakat tertentu dengan sembarang tanda-apa pun tandanya asal bisa dipakai untuk “menunjuk” (*labeling*), dan berlangsung dalam sebuah generasi yang dipengaruhi oleh kekuasaan.

Proses apskripsi dalam perspektif sejarah berfungsi seolah-olah seperti deskripsi terhadap sekelompok orang dan bagi kelompok itu deskripsi merupakan aturan bertindak. Berkat deskripsi para sarjana Indologi Belanda, Suku Jawa lalu dianggap punya perangai halus, pintar membawa dan mengendalikan diri, sementara Suku Madura sebaliknya. Dalam sejarah, yang menjadikan askripsi berfungsi seolah-olah seperti deskripsi adalah faktor politik dan kekuasaan. Selama hubungan kekuasaan masih berupa persaingan, etnisitas terbatas pada *rules of conduct* hingga disebut *kultural identity*. Begitu hubungan mulai jadi perebutan hegemoni, etnisitas menjadi political *ethnicity* yang bisa memicu konflik. Tak jarang, hegemoni berhasil menjadi kekuasaan berdaulat, tapi ini hanya mungkin bertahan dengan sistem penjajahan.

Perspektif *esensialist* melihat etnisitas sebagai sesuatu yang “primordial” dan menempatkannya sebagai sebuah entitas yang cenderung tetap, perspektif *constructivist* melihat etnisitas sebagai sesuatu yang bisa berubah dan tidak menetap. Bagi penganut perspektif ini, identitas etnik bersifat situasional dan bisa setiap saat bergeser atau berubah jika situasi atau konteks sosialnya berubah. Identitas etnik menurut perspektif *constructivist* bersifat *fluid* (*cair*). Oleh karena itu, identitas merupakan sesuatu yang bisa dikonstruksi dan disesuaikan dengan

kebutuhan (Riwanto 2007). Sebagai contoh, seorang dari Sulawesi Selatan yang di kampung halamannya tidak pernah memperlmasalahkan identitas etniknya, begitu sampai di Sabah karena harus bekerja untuk *survive* bisa menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Kesamaan agama yang dianut menyebabkan orang Bugis dengan cepat menggeser identitasnya (*shifting identity*) dari Bugis menjadi Melayu. Jika kembali ke Indonesia, dengan mudah ia akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis. Identitas etnik dengan demikian adalah sesuatu yang dikonstruksi dan bukan sesuatu yang bersifat primordial.

Pendekatan konstruktivis memandang identitas etnik memiliki batas-batas (*ethnic boundaries*) yang membuatnya berbeda dengan identitas etnik yang lain. Dalam banyak hal, batas-batas identitas etnik inilah yang dapat digeser-geser sesuai dengan situasi dan konteksnya. Batas-batas identitas ini, dengan demikian, merupakan sesuatu yang dapat dinegosiasikan (*negotiating boundaries*) sehingga bisa menjadi sesuatu yang bersifat instrumentalistik (Riwanto 2007: 144). Ciri-ciri yang dianggap menjadi identitas dari sebuah kelompok etnis menurut Barth sangat ditentukan oleh apakah hal itu yang dianggap penting oleh para aktor dan tokohnya.

Dalam kajian politik di Indonesia, etnisitas merupakan aspek yang dianggap penting dan mendapatkan tempat yang cukup besar meskipun mengalami pasang surut seiring dengan naiknya dan turunnya perhatian ilmuwan politik terhadap isu etnisitas pada tingkat global (Riwanto 2007). Belakangan, sejak bergulirnya reformasi di mana proses desentralisasi juga berlangsung secara simultan yang ditandai dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, telah menjadi awal berkembangnya semangat etnisitas dalam meraih peran-peran politik di daerah berdasarkan identitas etnik.

Lahirnya bangsa Indonesia merupakan hasil dari ikrar semangat kebangsaan yang kuat untuk meninggalkan identitas etnik dari setiap kelompok masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa etnisitas hilang begitu saja dari kehidupan politik di Indonesia. Identitas etnik tetap melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia meskipun Indonesia merdeka dari penjajahan dengan modal nasionalisme yang bersifat *civic nationalism* yang mengatasi batas-batas sempit dari sekat etnis maupun agama (Riwanto 2007). Apa yang disebut Clifford Geertz sebagai “primordial” merujuk kepada anggapan bahwa etnisitas adalah sebuah identitas yang telah dibawa sejak lahir. “Primordial” merupakan sesuatu yang bersifat *ascriptive* dan melekat pada setiap orang meskipun

semua adalah orang Indonesia, masing-masing memiliki identitas primordialnya sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bugis, orang Minang, orang Melayu, orang Kaili, orang Papua dan seterusnya.

Daniel N. Posner dkk (2007) berpendapat bahwa ada dua kecenderungan kalangan elit politik dan kandidat dalam menggunakan isu-isu etnis (*playing ethnic card*), para politisi dan kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang. *Pertama*, para politisi dan kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena pemilihan. Target yang ingin didapat adalah adanya kelekatkan dengan etnis yang menjadi objeknya. Para politisi dan kandidat memainkan kartu etnis untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilu berlangsung maupun setelah pemilu.

Apa yang disampaikan oleh Posner dkk (2007) tersebut nampaknya cukup penting dalam melihat kecenderungan dinamika etnisitas dalam berbagai peristiwa Pemilukada di beberapa daerah di Indonesia. Dari ratusan event Pemilukada yang pernah berlangsung di Indonesia, polarisasi etnis nampak mewarnai keseluruhan proses pelaksanaan Pemilukada. Tidak hanya itu, etnisitas juga berhimpit dengan beberapa faktor lainnya seperti agama dan suku dimana keseluruhan faktor tersebut berpengaruh terhadap geopolitik, ethno-politik dan demografik para konstituen dalam Pemilukada. Dalam arena Pemilu Presiden 2004 dan 2009, isu etnisitas nampak tidak muncul ke permukaan. Namun dalam beberapa event pemilukada, isu etnisitas nampak sempat muncul ke permukaan, sebagai cara dalam melakukan mobilitasi politik.

Pada zaman penjajahan Belanda Poso terkenal sebagai lahan misi Kristen paling sukses di Hindia Belanda (Aragon 2000, Schrauwers 2000, Kruyt 1970). Para misionaris Protestan Belanda Kruyt dan Adriani tiba pada tahun 1892 dan mulai menggunakan pendekatan etnografis yang kontras dengan metode-metode kurang sensitive yang dipakai di tempat lain mana pun yang sama sekali tidak terlepas dari proyek penjajahan. Keberhasilan misi mereka diperoleh setelah melalui kampanye yang berdarah-darah pada tahun 1905 ketika orang-orang pegunungan Pamona, Napu, Lore dan Kulawi berbondong-bondong memasuki agama para penguasa baru tersebut. Momentum traumatis tersebut adalah catatan pembentukan negara kolonial dengan identitas Kristen sebagai bagiannya di mana agen-agen keberhasilan itu diwakili oleh guru-guru

yang loyal, para tetua gereja dan para pegawai pemerintah yang dihasilkan (Klinken 2007:122).

Salah satu aspek penting dari migrasi suku bangsa pendatang ke Poso dalam masa Orde baru dan setelahnya adalah program transmigrasi. Transmigrasi sebagai proyek nasionalisme yang mengabsolutkan paradigma negara kesatuan yang membayangkan adanya sebuah komunitas tunggal dari rezim Orde Baru sesungguhnya dapat dikatakan telah gagal secara kultural, karena telah memunculkan sejumlah persoalan khususnya yang terkait dengan ketegangan-ketegangan hubungan antara komunitas asli Poso yang beragama Kristen dan kaum pendatang yang umumnya beragama Islam.

Dalam kurun waktu sesaat sebelum konflik komunal terjadi di Poso (1997), kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.923,88 km² dengan jumlah penduduk 402.462 jiwa, yang terdiri atas 21 wilayah kecamatan. Berdasarkan UU RI. No. 51 Tahun 1999 dibentuk sebuah kabupaten baru dalam wilayah Kabupaten Poso yaitu Kabupaten Morowali yang terdiri atas 13 wilayah kecamatan, termasuk 8 kecamatan diantaranya yang pada awalnya berada dalam wilayah Kabupaten Poso. Sejak akhir tahun 1990-an mayoritas penduduk Kabupaten Poso adalah pemeluk agama Kristen Protestan. Namun mulai tahun 2002, akibat datangnya gelombang pendatang besar-besaran yang beragama Islam, telah terjadi perubahan signifikan dalam komposisi kependudukan berdasarkan agama yaitu 57 persen adalah penduduk beragama Islam sedangkan Kristen Protestan 40 persen (BPS:2002).

Pemekaran yang kedua berdasarkan UU No.32 Tahun 2003 mengesahkan pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam menjadi titik balik perubahan geopolitik lokal Poso yang ditandai kembalinya penduduk asli Poso beragama Kristen Protestan menjadi jumlah mayoritas dengan persentase 68,52% . Dua pemekaran yang terjadi seiring dengan terbentuknya kabupaten baru yaitu Morowali dan Tojo Una-Una secara signifikan merubah kuantitas peta demografis di kabupaten ini. Sumber catatan kependudukan pada tahun 2001 menunjukkan bahwa setelah terjadinya konflik yang kemudian disusul oleh pemekaran kabupaten Morowali jumlah penduduk Kabupaten Poso yaitu 247.371 jiwa. Selain faktor pemekaran, arus keluar dari para pengungsi akibat kerusakan juga turut memengaruhi berkurangnya jumlah penduduk Poso. Sebelum terjadinya pemekaran untuk kedua kalinya, pada tahun 2003 tercatat jumlah penduduk Poso yaitu 275.974 jiwa

dengan luas wilayah 14.443,76 km² sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah yaitu 19 jiwa/km². Pada tahun yang sama setelah terbentuknya kabupaten Tojo Una-Una luas wilayah Poso semakin menciut 8.712,25 km² dengan jumlah penduduk 162.218 jiwa.

Sebagian besar bacaan mengenai kasus Poso menunjukkan bahwa terdapat tendensi-tendensi etno-religius yang terhubung dengan persaingan-persaingan kekuasaan di daerah ini bahkan jauh sebelum kekerasan komunal mencuat ke permukaan di Poso. Hanya saja menurut analisis ini, ketegangan-ketegangan yang berasal dari domain etno-religius tersebut tidak berakhir dengan pertikaian secara terbuka karena terdapat semacam konsensus tidak tertulis tentang *power sharing* antara para calon bupati dan wakilnya berdasarkan pembagian kekuasaan etno-religius, meski fakta menunjukkan bahwa dari 16 orang Bupati Poso (4 pejabat bupati) selama kurun waktu 1948-2010, 11 orang diantaranya beragama Islam.

Aragon (2000) misalnya, dengan menguatkan apa yang telah terlebih dahulu diungkapkan oleh Hefner (1998) menunjukkan bagaimana kombinasi kepentingan lintas kelembagaan politik-keagamaan yang ia sebut sebagai “paket aliansi segitiga” yang terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, dan Golongan Karya sebagai paket politik kuat dalam memperebutkan jabatan Bupati Poso periode 1999–2004. Sebuah kurun waktu di mana konflik kekerasan komunal terjadi secara intensif dan eskalatif.

Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Partai Pengusung

Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 diikuti oleh empat pasangan calon. Keempat pasangan ini memperlihatkan perpaduan yang unik dalam hal etnis dan agama yang menyertai identitas personal mereka di mata calon pemilih. Sebagaimana diketahui bahwa identitas yang melekat pada setiap individu akan menjadi penanda penting dalam kehidupan sosial. Wacana identitas berkembang seiring semakin bervariasi dan berkembangnya masyarakat. Keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika dilihat dari partai pengusung maka presentasi jumlah suara pengusung pasangan calon dapat disampaikan sebagai berikut: 1) pasangan Hendrik G. Lyanto – Abd. Muthalib Rimi yang didukung gabungan partai politik (Partai Golkar,

Tabel 1.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, Pemilukada tahun 2010

No	Nama Pasangan Calon	Etnis dan Agama	Pekerjaan Sebelumnya	Asal Partai Pengusung
1	Hendrik Gary Lianto – Abd Muttalib Rimi, SH, MH	Tionghoa-Bugis Kristen-Muslim	Pengusaha di Jakarta – Wakil Bupati	Partai Golkar, Gerindra, PAN
2	Ir. Sony Tandra – Kol (purn) Mulyadi (SOLID)	Tionghoa-Jawa Kristen - Muslim	Anggota DPR Propinsi Sulteng – Mantan Dandim Poso	Partai Patriot, Partai Hanura, PBR, PDIP, PPI, PPP dan RepublikaN
3	Drs. Frans Wangu Sowolino, M.Si-Burhanuddin Andi Masse, S.Kom	Pamona-Bugis Kristen-Muslim	Mantan Asisten Bupati-Direktur sebuah Akademi di Palu	PDS, PKPI dan PDP
4	Drs. Piet Inkiriwang, MM- Ir. T. Syamsuri (PERISAI)	Pamona+Minahasa-Jawa Kristen-Muslim	Bupati-Kepala Dinas PU Poso	Partai Demokrat

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian 2011

PAN dan Gerindra) memiliki dukungan 19,47% suara sah atau 20% kursi di DPRD. 2) pasangan Sonny Tandra-Mulyadi yang diusung oleh gabungan partai politik (Patriot, PDIP, PBR, Hanura, PPP, PPI dan Republika) memiliki dukungan 22,71% suara sah atau 23,33% kursi di DPRD. 3) pasangan Frans Sowolino-Burhanuddin Masse yang diusung oleh gabungan partai politik (PDS, PDP dan PKPI) memiliki dukungan 14,23% suara sah tetapi dengan perolehan 6 kursi atau 20% dari ketiga partai maka pasangan calon tersebut memenuhi syarat. 4) pasangan Piet Inkiriwang - Samsuri yang diusung oleh Partai Demokrat memiliki dukungan suara sah sebesar 26,66%.

Ada situasi yang sedikit berbeda dalam proses pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Poso di tahun 2010. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa sisi yaitu: *pertama*, meskipun konfigurasi etno-religius masih dijadikan referensi oleh empat pasangan kandidat bupati dan wakil bupati yang akan bersaing memenangkan pemilihan umum kepala daerah Poso periode 2010–2015, namun calon bupati secara keseluruhan diisi oleh nama-nama yang berasal dari agama Kristen dan semua calon wakil bupati beragama Islam.

Isu-isu Kampanye

Bagi pasangan *incumbent* (petahana) isu strategis yang paling banyak dikembangkan adalah keberhasilan mereka dalam melaksanakan pembangunan di daerah baik menyangkut pembangunan fisik maupun nonfisik. Keberhasilan dalam membangun pasar, menata kota, membangun jalur transportasi, membangun gedung-gedung mercusuar yang meskipun tidak bernilai ekonomis dan beragam bentuk keberhasilan pembangunan fisik sering diklaim sebagai bagian dari keberhasilan kandidat bupati atau wakil bupati petahana.

Sementara itu isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pembangunan non fisik adalah perbaikan layanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi isu yang paling banyak dijadikan jualan tim kampanye kandidat bupati petahana.

Sebagai kandidat petahana, Piet Ingkiriwang banyak mengkampanyekan keberhasilannya dalam menjaga keamanan dan memelihara perdamaian. Menurut para informan yang diwawancarai menyebutkan bahwa hampir disemua tempat pelaksanaan kampanye dan pada materi publikasi isu keamanan sangat ditonjolkan pasangan ini. Selain klaim keberhasilan pembangunan ekonomi, pendidikan dan rehabilitasi Poso pascakonflik sosial. Isu ini memang cukup mengena, karena masyarakat Poso kebanyakan sudah menyadari bahwa konflik kekerasan dan saling bunuh antar agama dan etnis adalah hal sia-sia. Sehingga salah faktor penting yang harus dijaga untuk terus melaksanakan pembangunan Poso adalah faktor keamanan dan ketertiban.

Bagi kandidat lain, isu keamanan ini dianggap sebagai klaim sepihak. Mereka menganggap bahwa terciptanya keamanan di Poso bukan andil dari kandidat petahana semata tetapi peran besar pemerintah pusat dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Poso. Selain itu mereka menganggap bahwa peran masyarakat yang telah menyadari pentingnya menjaga keamanan sehingga tidak lagi ada riak-riak yang mengganggu keamanan. Menanggapi hal tersebut tiga pasangan calon lainnya menganggap bahwa itu adalah klaim sepihak. Salah seorang Tim Kampanye Pasangan Hendrik Gery Lyanto-Thalib Rimi, Baharuddin Syafi'i di hadapan 12.000 massa yang memadati alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso, Poso Kota pada kampanye tanggal 25 Mei 2010 menyoal salah satu kandidat bupati yang mengklaim situasi keamanan Poso yang kini makin membaik adalah

kerja calon bupati petahana. Ia menyebutkan, keamanan tumbuh karena kesadaran masyarakat yang ingin hidup damai.

Patronase Politik dan Permainan Simbol-simbol Etnis dan Agama

Dalam hal keterlibatan simbol-simbol keagamaan tampaknya tidak terlalu signifikan dalam meraup perolehan suara calon bupati dan wakil bupati. Namun dalam hal paket calon yang diajukan masih sangat berpengaruh, ini terkait dengan proporsi jumlah penganut agama di Kabupaten Poso. Keterlibatan tokoh-tokoh kharismatik GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) misalnya tidak melibatkan simbol-simbolnya secara langsung tetapi mereka terlibat secara personal. Pendeta Damanik misalnya, yang secara terang-terangan mendukung pasangan Sonny-Mulyadi tidak membawa serta simbol-simbol GKST dalam kampanye. Beberapa tokoh lainnya mendukung pasangan lain sehingga dukungan juga terpecah.

Sementara di pihak Islam ketua FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam) salah satu organisasi penting pada masa konflik dan proses damai di Poso juga tidak terlibat langsung tetapi hanya melibatkan tokoh-tokoh kharismatiknya. Ustad Gani Israil yang kini menjadi anggota DPRD dari Partai Demokrat jelas mendukung Piet Ingkiriwang ketua DPD Partai Demokrat di Poso terlepas posisinya sebagai Ketua FKUI, tokoh lainnya tersebar ke calon pasangan lain. Hasil wawancara dengan Sapruni, pada tanggal 20 Juli 2011, yang merupakan seorang akademisi di Unsimar dan menjabat sebagai Pembantu Rektor III, menggambarkan bagaimana keterlibatan simbol agama dalam pilkada Poso:

“Iya yang jelasnya inikan tidak memilih bupati, tapi bupati dan wakil bupati jadi sekecil apa pun itu pasangan tetap memengaruhi umpamanya ketika rakyat terbentuk suatu koalisi terbentuk pasangan misalnya Kristen/Kristen saya pikir tidak memengaruhi dan sebaliknya. Saya pikir seberapa pun besarnya pengaruh dari calon bupati pasti calon wakil bupati tetap juga berpengaruh dalam pemilukada”

Sapruni juga menambahkan terkait dengan keterlibatan simbol-simbol keagamaan dalam pilkada Poso;

“Iya kalau itu pasti ada walaupun sebenarnya konteks pendeta dan ustad tidak bisa berpolitik dalam konteks pemilu itu tetap ada, yang jelasnya tidak membawa politik ke tempat ibadah tapi kalau dalam aktivitasnya saya pikir merupakan tanggung

jawab moral. Kalau secara individu iya tapi secara organisasi tentu tidak. Kalau yang paling banyak mendapat dukungan misalnya ketokohan pendeta-pendeta GKST atau kelompok agama lain.

Dengan perspektif lain, penulis melihat kampanye pemilukada sebagai ajang bagi bersatunya dua komunitas yang dulunya berkonflik berkat keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam satu tim kampanye. Jelas di sini bahwa patronase politik tokoh mendapatkan penegasannya, tetapi karena cairnya bentuk dukungan tokoh dari kelompok besar organisasi keagamaan menyebabkan calon pemilih juga memilih berdasarkan tokoh yang disegani. Lian menilai bahwa fenomena ini menegaskan adanya dekonstruksi masa lalu (konflik) sehingga meminggirkan hal-hal yang hegemonik di masyarakat bahwa konflik yang terjadi di masa lalu itu adalah konflik agama. Alih-alih meletakkan masa kampanye sebagai bagian dari ritual politik dalam Pilkada, masyarakat Poso menempatkannya sebagai bagian penting proses re-interpretasi yang menjadikan mereka melintasi batas identitas hingga akhirnya melakukan dekonstruksi konflik Poso.

Jika faktor agama nampaknya tidak lagi menjadi kunci kemenangan, faktor kedekatan etnis masih cukup bisa diperhitungkan meski dengan kadar yang relatif kecil. Hal ini dapat kita lihat pada perolehan suara kandidat berdasarkan kecamatan, yang menunjukkan adanya kecenderungan kemenangan pasangan tertentu pada daerah yang basis etnis di mana salah satu pasangan calon berasal. Misalnya kemenangan Pasangan Hendrik-Muthalib di Kecamatan Poso Kota Utara dan Poso Kota ditengarai karena faktor ketokohan Muthalib yang kebetulan beretnis Bugis, etnis yang mayoritas di kedua kecamatan tersebut. Demikian halnya dengan posisi nomor 2 yang diperoleh pasangan Sonny-Mulyadi di Kec. Poso Kota ditengarai karena faktor kesamaan etnis Mulyadi dengan etnis terbanyak kedua di kecamatan ini, yaitu Jawa. Selain dari data perhitungan tersebut, pada saat kampanye terdapat banyak paguyuban berbasis etnis yang mengambil bagian dalam pawai dengan spanduk-spanduk pernyataan dukungan atas calon tertentu. Menurut keterangan informan, Iskandar Lamuka, sepanjang pengamatannya paguyuban-paguyuban itu cukup berpengaruh dalam mengumpulkan massa pada saat kampanye. Ia mencontohkan bahwa terdapat keterlibatan Laskar Bugis Makassar, Kesatuan Masyarakat Gorontalo dan Paguyuban Masyarakat Jawa. Pada saat penelitian, tim peneliti masih sempat menemukan spanduk yang tertempel di sebuah kios di jalan poros Poso-Moengko yang meski sudah

agak usang tapi masih jelas tertulis “Posko Laskar Bugis-Makassar”.

Permainan simbol-simbol etnis dan agama itu tidak lepas dari harapan memperoleh dukungan pada basis massa yang spesifik. Konstruksi simbol-simbol tersebut dengan sengaja dihadirkan tim kampanye untuk menggugah para calon pemilih dengan bentuk proximitas dan kebanggaan etnis. Ini tentu saja tidak lepas dari masih kuatnya bentuk politik patronase dan karakter komunalisme pada masyarakat pedesaan di Poso.

Bentuk lain yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan simbol-simbol yang menunjukkan identitas primordial. Penggunaan pakaian adat misalnya memberikan ciri khusus yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari komunitas tertentu. Penggunaan pakaian adat sebagai simbol identitas etnis seseorang dalam pilkada menunjukkan adanya upaya untuk menggiring komunitas pada pilihan seragam dengan upaya menonjolkan simbol-simbol bersama. Para kandidat berusaha menunjukkan identitas tersebut jika berada pada komunitas etniknya. Kandidat calon wakil bupati, Samsuri misalnya mengenakan blangkon sebagai simbol lelaki Jawa. Demikian halnya dengan kandidat bupati Frans Sowolino yang senantiasa mengenakan pakaian adat Pamona untuk mempertegas identitasnya sebagai orang asli Pamona sebagaimana getol ia kampanyekan.

Bermainnya simbol-simbol tersebut dalam tataran politik lokal tidak dapat dihindari karena masih kuatnya isu etnisitas dalam setiap kontestasi politik. Bahkan jika kita merujuk pada data-data pemekaran wilayah, sebagai kebijakan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa kesamaan latar belakang sejarah dan kesamaan etnis menjadi salah satu alasan utama dimekarkannya sebuah daerah otonom baru. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Horowitz & Long (2006) bahwa persoalan etnisitas dalam arena kontestasi ini dapat direduksi jika para kandidat dan politisi yang terpilih dalam arena pemilihan mampu memberikan sejumlah kebijakan publik yang memperhatikan dan mengakomodasi kalangan etnik minoritas yang kalah dalam kontestasi. Begitu pun dengan pendapat Posner dkk (2007) bahwa ada dua kecenderungan kalangan elit politik dan kandidat dalam menggunakan isu-isu etnik (*playing ethnic card*), para politisi dan kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang pilkada. *Pertama*, para politisi dan kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena pemilihan. Target yang ingin didapat adalah adanya

kelekatan dengan etnik yang menjadi objeknya. Para politisi dan kandidat memainkan kartu etnik untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilu berlangsung maupun setelah pemilu.

Riak-riak pada Penyelenggara Pemilukada

Berdasarkan keterangan informan penelitian, pelaksanaan pemilukada Poso tahun 2010 berlangsung cukup aman. Kekhawatiran akan adanya gejolak politik sebagaimana terjadi pada pemilukada tahun 2005 tidak terbukti. Meski rangkaian kegiatan pemilukada tidak lepas dari protes dan unjuk rasa kelompok masyarakat pendukung pasangan tertentu.

Pilkada yang pada akhirnya melahirkan pemenang, pasangan bupati petahana, Piet Ingkiriwang dan wakilnya Samsuri juga tidak luput dari gugatan pasangan calon lain. Pasangan Gary Lyanto-Abdul Muthalib Rimi yang menjadi juru kunci dalam perolehan suara, mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan pasangan pemenang pemilukada dan KPUD Poso telah melakukan kecurangan selama pelaksanaan pilkada. Namun hasil sidang Mahkamah Konsitusi, tanggal 1 Juli 2010 menolak gugatan Gary Lyanto-Muthalib dengan alasan pemohon tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi kecurangan sistematis, terstruktur dan massif pada pelaksanaan pilkada tersebut.

Mencermati kondisi yang relatif aman dalam pelaksanaan pilkada Poso tahun 2010 tampaknya ada peran para aktor utama dalam pemilukada yang memahami bahwa mereka harus bekerja sama dan mengkoordinasi upaya pelaksanaan pemilukada yang damai. Pertemuan-pertemuan antara KPUD, Panwaslu, Pemda, Kapolres, TNI dan para tokoh agama sering dan cepat diadakan tiap kali ada isu-isu yang muncul. Selain itu kehadiran aparat keamanan sangat strategis dalam membendung isu dan upaya untuk mengacaukan Poso. Sebagaimana diketahui di pada saat pemilukada aparat keamanan yang bertugas meliputi lebih dari 1,600 petugas polisi, termasuk 230 anggota Brimob, serta 150 anggota TNI, dan hampir semuanya ditugaskan untuk mengamankan pemilu kada 2010. Paling sedikit satu orang anggota polisi menjaga tiap-tiap TPS di Poso yang berjumlah 460.

Simpulan

Pemilukada langsung menjadi ajang terjadinya kontestasi dan rivalitas secara terbuka para tokoh

politik Poso dalam meraih dukungan politik untuk mencapai kekuasaan. Pemilukada langsung telah menguji tesis-tesis tentang etnisitas dan politik identitas yang selama ini diyakini bersumbangsih besar terhadap terjadinya konflik kekerasan berkepanjangan. Situasi tersebut nyata-nyatanya mendapatkan pembuktian ketika pemilukada langsung dilaksanakan pertama kalinya tahun 2005. Konflik kekerasan mewarnai pelaksanaan pemilukada tersebut.

Pemilu tahun 2010, memperlihatkan adanya pergeseran yang signifikan dalam hal penggunaan identitas etnik dalam memperebutkan suara calon pemilih. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Pemilukada Poso tahun 2010 menguatkan wacana tentang pentingnya rasa aman dan kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan sebagai isu utama dalam kampanye dibandingkan dengan isu-isu etnisitas yang selama ini ditengarai berperan besar dalam setiap konflik di Poso. Kejenuhan dan frustrasi masyarakat Poso terhadap konflik kekerasan yang berkepanjangan telah merubah lanskap politik identitas yang selama ini mapan dalam politik Poso. Tampaknya terjadi re-interpretasi dalam masyarakat Poso ketika menerjemahkan identitas agama dan suku sebagai pertimbangan utama pemilih dalam memilih pasangan calon. Isu-isu yang keamanan dan kesejahteraan menenggelamkan berbagai identitas etnik. Tenggelamnya identitas sebagai isu utama (berbanding terbalik dengan isu awal konflik Poso) menunjukkan “kesepakatan” alami (yang diam namun memiliki dampak mendalam) tentang adanya politisasi isu agama dalam konflik kekerasan yang mereka alami. Hasil dari proses re-interpretasi tersebut telah melahirkan pengakuan tentang kepentingan bersama pada kekinian dan masa depan Poso. Bukti pengakuan ini diekspresikan pada bergabungnya masyarakat lintas agama dan suku dalam kerumunan massa kampanye tanpa gesekan dan sentimen tertentu. Bahkan, di luar berbagai kepentingan ekonominya, antar eks kombatan dari kedua kelompok keagamaan bergabung dan memperjuangkan kandidatnya.

Meski demikian jika mencermati lebih dalam, aspek-aspek politik identitas tetap bermain meski dalam kadar yang relatif kecil. Ikatan primordial dan isu identitas masih dapat ditemukan dalam

serangkaian proses pelaksanaan pemilukada, terutama dalam kampanye dan sosialisasi di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat misalnya dengan penggunaan simbol-simbol etnis, simbol-simbol keagamaan dalam berbagai kesempatan, meski tidak melibatkan secara langsung aspek kelembagaan agama. Contoh lainnya adalah kemenangan pasangan calon tertentu di wilayah yang mayoritas memiliki kesamaan identitas baik etnik, asal daerah dan agama buktinya pasangan Gary Lyanto-Abdul Muthalib Rimi menang di Kecamatan Poso Kota Utara dan Poso Kota yang banyak dihuni masyarakat etnis Bugis, sebagaimana diketahui Muthalib adalah tokoh masyarakat yang beretnis Bugis.

Terakhir, sebagai penutup dapat dikatakan bahwa konflik kekerasan dapat dihindari dalam pelaksanaan pemilukada langsung di Poso tahun 2010 adalah karena kekompakan para penyelenggara dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik. Kesiapan penyelenggara, dalam hal ini KPU serta ketegasan, kejujuran dan ketokohan Ketua KPU Poso mendapat apresiasi banyak pihak dalam menyelenggarakan pemilukada. Demikian halnya Panwaslukada, aparat keamanan dan pemerintah daerah yang selalu berkoordinasi dalam menyikapi setiap masalah yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada.

Daftar Pustaka

- Abdillah SU (2002) *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Aragon LV (2000) *The Colonial Introduction of Religion and Language as Ethnicity in Sulawesi, Indonesia*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Barth F (1988) *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UIP.
- Eriksen TH (1993) *Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective)*. London: Pluto Press.
- Horowitz J & James DL (2006) *Democratic Survival in Multi-ethnic Countries*. Working Paper. Department of Political Science, University of California, California.
- INCIS (2002) *Hubungan Antar Etnik dan Masalah Kebangsaan di Jakarta*, Laporan Penelitian INCIS Jakarta.
- Klinken GV (2007) *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor-KITLV.
- Suryadinata, Leo, Arifin, Evi N & Aris A (2003) *Penduduk Indonesia: Etnisitas dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.